



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

# LKjIP

**KECAMATAN  
TANETE RIATTANG  
BARAT**

**TAHUN  
2021**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata Ala atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021

Merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ke empat dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023 LKj Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023). Penyusunan LKj Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat Komitmen dalam penyusunan LKj Kecamatan Tanete Riattang Barat, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Tanete Riattang Barat untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 2 indikator kinerja utama, semua indikator telah memenuhi target yang ditetapkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



Terimakasih

Watang Palakka, 26 Februari 2022

Camat Tanete Riattang Barat

**HASNAWATI RAMLI, S.Sos, M.Si**

Pangkat :IV/b

NIP : 196907171989082001



## **BAB I. PENDAHULUAN 1**

- A. UMUM**
- B. ORGANISASI**
- C. ISU STRATEGIS**
- D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA 9**

- A. TUJUAN DAN SASARA**
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- C. INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- D. PERJANJIAN KINERJA**
- E. STANDAR PENILAIAN KINERJA**

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 15**

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

## **BAB IV. PENUTUP 25**

- A. KESIMPULAN UMUM**
- B. KENDALA PELAKSANAAN  
DAN USAHA MENGATASINYA**





# BAB I

## PENDAHULUAN

KECAMATAN  
TANETE RIATTANG  
BARAT



## A. UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat Pemerintahan Kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kinerjanya, dampak yang diharapkan adalah terwujudnya clean government dan good governance pada Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

Kecamatan Tanete Riattang Barat sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bone luas wilayah sekitar 53,68 Km<sup>2</sup> dengan koordinat geografis berada pada 4031'48"LS dan 120017'17"BT, dengan batas wilayah sebagai berikut :



1.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Awangpone



2.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Barebbo



3.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanete Riattang



4.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Palakka





Kecamatan Tanete Riattang Barat berada pada kategori lokasi Dataran yang mempunyai jarak tempuh 5 Km dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten, dan secara administrasi terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan yaitu:

1.

**KELURAHAN MAJANG**

2.

**KELURAHAN MACEGE**

3.

**KELURAHAN JEPPE'E**

4.

**KELURAHAN MACANANG**

5.

**KELURAHAN MATTIRIO WALIE**

6

**KELURAHAN BULU TEMPE**

7.

**KELURAHAN WATANG PALAKKA**

8.

**KELURAHAN POLEWALI****PETA KECAMATAN**



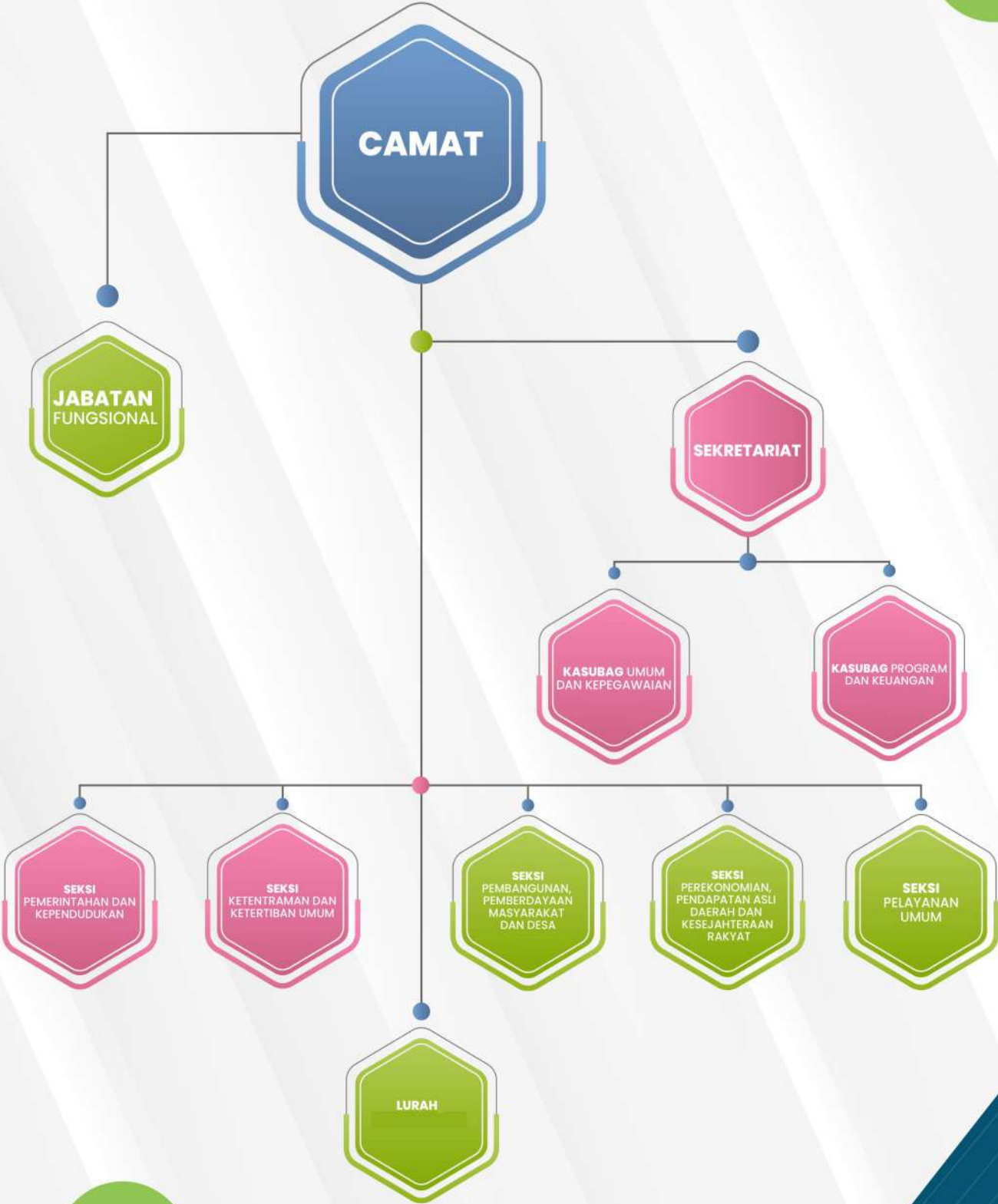
## B. ORGANISASI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8 dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan SibuluE diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor : 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan Tanete Riattang Barat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan





Susunan kepegawaian dan jumlah Personil di Kecamatan Tanete Riattang Barat sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Susunan Pegawai Kecamatan Tanete Riattang Barat**

NO	SUSUNAN KEPEGAWAIAN		JUMLAH PERSONIL
1	2		3
1	CAMAT		1
2	SEKERTARIS CAMAT		1
3	LURAH		8
4	SEKRETARIS LURAH		6
5	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		–
	●	Pengadministrasi Umum	1
	●	Pengadminstrasi Kepegawaian	–
	●	Analisis Data dan Informasi	–
6	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN		1
	●	Pengelola Gaji	–
	●	Bendahara	1
	●	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	–
7	KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN		1
	●	Pengadministrasi Kependudukan	–
	●	Pengadministrasi Pemerintahan	2
	●	Analisis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah	–
8	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1
	●	Analisis Keamanan	–
	●	Pengadministrasi Umum	1
9	KASI PEMBANGUNAN,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA		1
	●	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	–
	●	Pengadministrasi Umum	1
10	KASI PEREKONOMIAN,PAD DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		1
	●	Pengadministrasi Umum	1
	●	Analisis Perekonomian	–
11	KASI PELAYANAN UMUM		1
	●	Pengadministrasi Umum	1
	●	Analisis Pelayanan	–
Jumlah			30

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Tanete Riattang Barat 2021



Tabel 1.2 Komposisi SDM Organisasi

KOMPOSISI SDM ORGANISASI UNIT KERJA KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT								
NO	JENIS PENDIDIKAN	JML	NO	GOL.	JML	NO	JABATAN	JML
1	SD	-	1	I	-	1	STRUKTURAL	9
2	SMP	-	2	II	10	2	FUNGSIONAL	-
3	SMA	13	3	III	41	3	PELAKSANA	-
4	DIPLOMA 1	-	4	IV	1			
5	DIPLOMA 2	-						
6	DIPLOMA 3	1						
7	STRATA 1	33						
8	STRATA 2	5						
JUMLAH		52	JUMLAH		52	JUMLAH		9

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Tanete Riattang Barat 2021



### C. ISU STRATEGIS

Isu strategis seperti yang tertuang dalam Permendagri 86/2017 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan Dalam Perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tanete Riattang Barat adalah sebagai berikut:

1.

Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Tanete Riattang Barat sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.

2.

Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.

3.

Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.

4.

Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.

5.

Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

6.

Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan terikat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemakmuran manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

7.

Pandemic covid 19. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia.



#### D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar segala Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan terealisasi dengan baik dan optimal di Kecamatan Tanete Riattang Barat, maka dilaksanakan beberapa strategi antara lain :

01

Peningkatan Kapasitas  
**Sumber daya Aparatur**

02

Peningkatan kualitas dan kapasitas  
**pelayanan public di Kecamatan**

Peningkatan dan perbaikan system  
**pelaporan dan capaian kinerja**

03

04

Perbaikan dan pemuktahiran data yang  
**valid dalam system pelayanan public**

05

Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik,  
**bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN).**





# **BAB II**

# **PERENCANAAN**

# **KINERJA**

KECAMATAN  
**TANETERIATTANG**  
**BARAT**



A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi, yang telah ditetapkan, yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kec. Tanete Riattang Barat, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai dari masing-masing tujuan tersebut antara lain, Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tellu Siattinge.	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	D	CC	B	BB	A
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)	90	90	92	100	100

Sumber Data:PerubahanRencana Strategis Tahun 2018-2023



## B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 1. Strategi

Kecamatan Tanete Riattang Barat sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Adapun strategi yang telah ditetapkan yaitu :

**“Optimalisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen Perangkat Daerah”**

### 2. Arah Kebijakan

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Tanete Riattang Barat, maka ditetapkan 1 (satu) arah kebijakan yaitu :

**“Mengembangkan system opsional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum”.**



Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan



Sumber Data: Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanete Riattang Barat digunakan untuk mengukur kinerja utama atau keberhasilan organisasi pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanete Riattang Barat ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan



Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanete Riattang Barat yang secara langsung menunjukkan kineja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanete Riattang Barat

	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	-	-	B	BB	A
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	90	90	92	100	100

Sumber Data :PerubahanRencana Strategis Tahun 2018-2023



#### D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023, dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Tahun 2021 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana pada Tahun 2021 Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Tahun 2021 menetapkan target-target kinerja sebagaimana target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut.

**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2021**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan</b>	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	<b>B</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<b>Rp. 16,366,021,511</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	<b>92</b>	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<b>Rp. 30.999.900</b>
			PEMEBERDAYAAN MASYRAKAT DESA DAN KELURAHAN	<b>Rp.1,960,000,000</b>
			KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<b>Rp. 27.000.000</b>
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 18,493,165,361</b>

**Sumber Data :Perjanjian Kinerja 2021**

Perjanjian Kinerja Camat Tanete Riattang Barat dan Staff dapat diakses dengan scan barcode berikut :



SCAN ME



E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Bone. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun pencapaian Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

Tabel 2.6 Tabel Standar Penilaian Kinerja

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cakupan tercapai/Cukup tercapai
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Capaian Indikator Kinerja =  $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$





# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**

**KECAMATAN**  
**TANETE RIATTANG**  
**BARAT**



## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target / rencana masing-masing misi Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan cara mencapainya melalui sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program dan kegiatan serta disusun sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui tingkat prosentasi pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tanete Riattang Barat meliputi:



TUJUAN

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan Indikator :

- Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator :

- Persentase Pelayanan pada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	BB	117%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	90	100	108,7%	Berhasil
Rata-rata				112,85%	Sangat tercapai/ Sangat berhasil

Sumber Data :PerubahanRencana Strategis Tahun 2018-2023

SASARAN 1.

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan Indikator :

- Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator 1

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi dan Capaian Kinerja						Target Renstra	Target Nasional	Ket.
			2019		2020		2021				
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	D	89%	B	140%	BB	117%	A	-	Sangat Berhasil

Sumber Data :Hasil Evaluasi sementara yang diolah



Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan dan diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2021 dengan persentase 117% dengan realisasi kinerja BB dari target B yang ditetapkan. Berdasarkan hal itu maka capaian tersebut dapat dikategorikan sangat berhasil.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama yaitu Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP telah melebihi capaian dari tahun 2019 sebesar 89% dengan predikat D dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2020 dengan predikat B. Realisasi tersebut juga belum memenuhi target akhir renstra dengan realisasi BB sehingga diperlukan perbaikan dan peningkatan capaian indikator kinerja ini, dan tidak dapat disandingkan dengan standar nasional karena kecamatan Tanete Riattang Barat belum melakukan standar pelayanan Minimal/standar Nasional.

#### Keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja utama disebabkan oleh :

01

Perbaikan terhadap kuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat melalui perumusan perencanaan strategis yang semakin responsive, sesuai dengan kebutuhan masyarakat tepat, akuntabel dan berorientasi hasil pada dokumen perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tanete Riattang Barat

02

Pengawasan dan evaluasi pencapaian kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat dilaksanakan secara berkala per triwulan dan semester dengan melibatkan pihak internal dan pihak eksternal atau perangkat daerah lain yaitu Inspektorat Daerah Badan Perencanaan Daerah, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone

03

Peningkatan Pengelolaan anggaran yang semakin akuntabel dan transparan dengan kontroling dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran.



Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut maka telah dilaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Nilai B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	Akan memperbaiki system perencanaan dan penganggaran
JUMLAH					100%	100%	100%	

SumberData: untuk realisasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan terlampir

Untuk lebih lanjut silahkan scan QR Code berikut:



Berdasarkan hasil capaian kinerja yang disandingkan dengan persentase realisasi penyerapan anggaran dari 2 program pendukung maka efisiensi sumber daya untuk pencapaian target kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Tabel 3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
A	B	C	D	e(d/cx100%)	F	G	h(g/f x100%)	i(e-h)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	BB	117	16.366.051.511	16.158.313.975	98,73	18,27

SumberData:SPJ Fungsional (C3) Tahun 2021 Kecamatan Tanete Riattang Barat

Analasis dan efisensi penggunaan dana silahkan akses :





SASARAN 1.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator :

- Persentase Pelayanan pada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator 1

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi dan Capaian Kinerja						Target Renstra	Target Nasional	Ket.
				2019		2020		2021				
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan pada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar Pelayanan	Persen	92	86	100%	100	113%	100	108,7	100%	-	Berhasil

Sumber Data : Hasil Evaluasi sementara yang diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2021 dengan persentase 108,7% dengan realisasi kinerja 100% dari target 92%. Dari 1052 jumlah permohonan pelayanan oleh masyarakat telah dilakukan pelayanan sesuai standart pelayanan dan peraturan perundang-undangan. Capaian tersebut dikategorikan berhasil.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik telah melebihi capaian dari tahun 2018 sebesar 85% dan 2019 sebesar 86% dan sama dengan realiasasi tahun 2020 sebesar 100% dengancapaian 113%. Realisasi tersebut juga telah memenuhi target akhir renstra dengan realisasi 100% sehingga target tahunberikutnyaakandisesuaikan dan tidak dapat disandingkan dengan standar nasional karena tidak melakukan standar pelayanan Minimal/standar Nasional.



Keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja utama disebabkan oleh :

- 01 **Peningkatan Pelayanan yang diberikan oleh aparatur kecamatan yang semakin cepat dan berkualitas**
- 02 **Bertambahnya sarana dan prasarana pelayanan**
- 03 **Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang teknologi informasi guna menunjang kelancaran pelayanan masyarakat**
- 04 **Meningkatkan pemahaman semua aparatur pelaksana pelayanan terhadap Perubahan dan perkembangan peraturan bidang pelayanan masyarakat.**

Dalam pencapaian indikator ini meskipun telah mencapai target yang telah ditetapkan masih diperoleh beberapa kendala antara lain :

- 01 **Terjadinya pandemi Covid-19 yang menghambat pelaksanaan pelayanan publik**
- 02 **Kurangnya Sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik seperti alat perekaman e-KTP**
- 03 **Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap peraturan perundang -undangan daerah yang berlaku**



Untuk menangani kendala tersebut dilakukan dengan solusi sebagai berikut:

- 01Melakukan digitalisasi pelayanan dan perubahan SOP pelayanan yang disesuaikan denganProtokol Kesehatan penanganan covid 19
- 02Melakukan perbaikan dan pengadaanalatperekaman e-KTP
- 03Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sumber daya paratur tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku

Untuk mendukung pencapaian kinerja indikator tersebut maka telah dilaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatansebagai berikut:

Tabel 3.5 Program dan Kegiatan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pesentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan seseuai standar pelayanan	100 %	PEROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	100%	
			PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan koordinasi ketertiban dan ketentraman umum	100%	100%	100%	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan realisasi penyelenggaraan dan pelayanan publik	100%	100%	100%	
JUMLAH					100%	100%	100%	

SumberData: untuk realisasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan terlampir

Untuk lebih lanjut silahkan scan QR Code berikut:





Berdasarkan hasil capaian kinerja yang disandingkan dengan persentase realisasi penyerapan anggaran dari 2 program pendukung maka efisiensi sumber daya untuk pencapaian target kinerja sasaran ini sebagaiberikut :

Tabel 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
A	B	C	D	e(d/cx100%)	F	G	h(g/f x100%)	i(e-h)
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar Pelayanan	92	100	108,7	2.127.113.850	1.843.972.079	86,69	22,01

SumberData:SPJ Fungsional (C3) Tahun 2021 Kecamatan Tanete Riattang Barat

Analasih dan efisensi penggunaan dana silahkan akses :





Dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Tanete Riattang Barat, maka dari itu kami tampilkan tabel perbandingan anantara Indikator Kinerja Utama Sebelum Perubahan dan Indikator Kinerja Utama Setelah Perubahan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan IKU

INDKATOR KINERJA UTAMA SEBELUM PERUBAHAN								INDIKATOR KINERJA UTAMA SETELAH PERUBAHAN							
Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		2018		2019		2020				2018		2019		2020	
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan publik	85	100%	86	100 %	100	113%	Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	86	100%	86	113 %	100	108,7%
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase Pengaduan Pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti diselesaikan	88	100%	90	100%	100	113%	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	D	89%	B	100%	BB	117%
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarkat hasil musrenbang Kelurahan/Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	50	100%	60	100%	72	113%								
Terciptanya keamanan, ketentraman dan keteriban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	90	100%	92	100%	95,65	102,82%								
Terciptanya keamanan, ketentraman dan keteriban Masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap	85	100%	87	100%	90	100%								

Sumber Data :Hasil Evaluasi sementara yang diolah



Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Kecamatan Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp.18,493,165,361(Delapan Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)		Persen (%)
	Anggaran	Realisasi	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
PROGRAM :			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 16,366,051,511	Rp. 16,158,313,975	98.73
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.30,999,900	Rp.30,977,850	99.93
PEROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.2,069,113,950	Rp.1,785,994,248	86.32
PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM	Rp.27,000,000	Rp.27,000,000	100.00
TOTAL	Rp.18,493,165,361	Rp.18,002,286,073	97.35

Sumber Data : C3 Desember 2021

Realisasi Anggaran secara lengkap dapat di akses melalui QR Code Berikut :







**BAB IV**

# **PENUTUP**

**KECAMATAN  
TANETERIATTANG  
BARAT**



## A. SIMPULAN UMUM

Pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran 2021 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 112,85 % atau kategori *sangat berhasil*.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Tanete Riattang Barat mensyaratkan terbangunnya kerjasama yang bersinergi antar seluruh stakeholder. Hal ini karena proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada dasarnya merupakan jalinan interaksi yang melibatkan banyak komponen atau pelaku dalam masyarakat. Tanpa terbangunnya jalinan interaksi yang konstruktif, terbuka dan sinergis antar berbagai komponen tersebut, perjalanan proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bukan saja akan berjalan lambat dan kurang terarah, tetapi juga sekaligus berpotensi untuk semakin jauh dari Visi dan Misi yang hendak diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat benar-benar menjadi alat kendali, alat penilai kualitas kinerja sesuai tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dan benar-benar menjadi alat pendorong bagi terwujudnya Good Governance sesuai tuntutan kemajuan jaman. Kecamatan Tanete Riattang Barat dalam mengelola anggaran keuangan guna mewujudkan kesejahteraan bagi warganya telah menetapkan 1 Tujuan, 1 Sasaran dan 11 (Sebelas) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional yang ingin diwujudkan/dicapai dalam sasaran, program dan kegiatan.



## B. KENDALA PELAKSANAAN

### DAN UPAYA MENGATASI

#### Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran indikator kinerja Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan presentase 112,85% dengan predikat *Sangat Berhasil* terdapat beberapa kendala antara lain :

- 01 Terjadinya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan perubahan SOP dalam melayani masyarakat.
- 02 Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
- 03 Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

#### Upaya dalam mengatasi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu :

- 01 Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
- 02 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
- 03 Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP



## Lampiran :

- 01 Cascading Kinerja
- 02 Perjanjian Kinerja
- 03 Pengukuran Kinerja
- 04 Penghargaan
- 05 Lampiran lainnya, dll

Seluruh lampiran  
dapat di akses  
melalui QR Code  
Berikut :

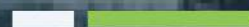
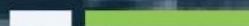






# CASCADING KINERJA

KECAMATAN  
TANETE RIATTANG  
BARAT











# PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

KECAMATAN  
TANETE RIATTANG  
BARAT

TAHUN  
**2021**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawahini:

Nama :HASNAWATI RAMLI, S.Sos., M.Si  
Jabatan :CAMAT TANETE RIATTANG BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :**DR. H. A FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si**  
Jabatan :BUPATI BONE

Selaku atasan pihak pertama,selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian targetkinerjatersebutmenjadi tanggung jawabkami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 18 Oktober 2021

PihakKedua,  
**BUPATI BONE**

  
**DR. H. A FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si**

PihakPertama,  
**CAMAT TANETE RIATTANG BARAT**

  
**HASNAWATI RAMLI, S.Sos.M.Si**  
Pangkat :IV/b  
NIP : 196907171989082001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT  
KABUPATEN BONE**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan</b>	<b>Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP</b>	B
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang Dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	92


NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp. 16,366,021,511</b>
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp.2,190,350
b.	Administrasi Kepagawainan Perangkat Daerah	Rp.7,260,000
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.452,444,950
d.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.15,265,127,353
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.62,139,000
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.503,747,000
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.73,142,858
2.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Rp. 30,999,900</b>
a.	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp.30,999,900
3.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Rp.1,960,000,000</b>
a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.741,204,800
b.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp. 1,218,795,200
4.	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Rp. 27,000,000</b>
a.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 27,000,000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 18,493,165,361</b>

Watampone, 18 Oktober 2021

Pihak Kedua,  
**Bupati Bone,**

  
**DR. H. A FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si**

Pihak Pertama,  
**CAMAT TANETE RIATTANG BARAT**

  
**HASNAWATI RAMLI, S.Sos.M.Si**  
Pangkat :IV/b  
NIP : 196907171989082001





# PENGUKURUAN RENCANA AKSI

KECAMATAN  
TANETE RIATTANG  
BARAT

TAHUN  
**2022**



Capaian Kinerja dan realiasi anggaran Program Kegiatan Perangkat Daerah  
Kecamatan Tanete Riattang Barat

NO	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI		PERSENTASE REALISASI		EFISIENSI	PERMASALAHAN	SOLUSI DAN TINDAK LANJUT	ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN
										KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN				
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Realisasi penunjang Pemerintahan Daerah	Persen	100	16,366,021,511	100	16,158,319,975	100 %	98.73 %	1.27 %	Pandemi Covid 19 membatasi kegiatan perkantoran sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja sedikit terhambat karena pelaksanaan rapat evaluasi yang dibatasi, pembatasan anggaran akibat refocusing juga membuat pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan optimal	melakukan Rapat evaluasi kinerja secara berkala per triwulan dan melakukan pemangkasan dan pengoptimalan penggunaan anggaran dengan efisien	keberhasilan ini didukung dengan manajemen kinerja dan keuangan yang telah dibangun, disiplin pegaeai serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung penunjang urusan
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	2,190,350	100	2,185,550	100 %	99.78 %	0.22 %	Penyediaan Data Pendukung Capaian Kinerja dan Keuangan Masih Belum Memadai	Diperlukan pendokumentasian pelaksanaan program dan kegiatan pendukung capaian kinerja dan keuangan baik dokumen fisik dan elektronik	keberhasilan ini ditunjang dengan pencapaian kinerja kecamatan mencapai target yang telah ditentukan namun kedepannya diharapkan penyediaan data dan dokumentasi perlu ditingkatkan dengan digitalisasi arsip dokumentasi pelaksanaan program, kegiatan dan pencapaian sasaran dan tujuan kecamatan
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Laporan	3	1,000,200	3	996,000	100 %	99.58 %	0.42 %			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	4	1,190,150	4	1,189,550	100 %	99.95 %	0.05			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	7,260,000	100	7,260,000	100 %	100.00 %	Efisien			



Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	stell	40	7,260,000	40	7,260,000	100 %	100.00 %	Efisien	Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan terpenuhi	pengadaan pakaian dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi anggaran	Keberhasilan ini ditunjang dengan penggunaan anggaran dengan efektif dan efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan administrasi Umum	Persen	100	452,444,950	100	423,706,050	100 %	93.65 %	6.35 %	Pelaksanaan Administrasi umum perangkat daaerah terpenuhi	Memaksimalkan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan administrasi umum dengan efektif dan efisien	keberhasilan ini ditunjang dengan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pelayanan administrasi umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Laporan	12	53,635,900	12	50,781,900	100 %	94.68 %	5.32	Pelaksanaan Administrasi perkantoran terpenuhi	Meminimalkan penggunaan ATK pada Tahun Anggaran berikutnya dengan beralih kepada pemanfaatan digitalisasi	Keberhasilan ini ditunjang dengan penyediaan ATK yang terpenuhi sesuai kebutuhan dan kedepannya modernisasi pelayanan dengan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk meminimalisir kebutuhan ATK dalam pemberian pelayanan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minum bagi pegawai dan tamu sesuai rencana kebutuhan	Laporan	12	221,382,000	12	202,646,000	100 %	91.54 %	8.46	Penyedian bahan logistik kantor terpenuhi dengan baik	efektifitas penggunaan anggaran makan minum pegawai dan tamu sesuai rencana kebutuhan	keberhasilan ini ditunjang oleh efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran dalam penyediaan makan minum
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan bahan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana kebutuhan	Laporan	12	23,407,050	12	22,998,150	100 %	98.25 %	1.75	Penyedian barang cetak dan penggandaan terpenuhi	memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pelayanan publik	Keberhasilan ini ditunjang dengan kemampuan SDM aparatur yang meningkat dengan kemampuan dalam penggunaan Teknologi dan informasi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Laporan	12	22,620,000	12	19,070,000	100 %	84.31 %	15.69	pembayaran tagihan bahan bacaan yang tidak tetap	Berlangganan bahan bacaan /koran yang kontinyu	Keberhasilan ini ditunjang dengan pembayaran pembayaran tagihan bahan bacaan sesuai kebutuhan dan penyusunan kontrak kerja dengan pihak ketiga sebagai penyedia koran selama setahun agar tidak terjadi perubahan harga



[illegible]

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perelatan dan mesin lainnya	Unit	5	41,131,000	5	32,931,000	100 %	80.06 %	19.94 %	pengadaan peralatan gedung kantor terpenuhi sesuai kebutuhan	Memperhatikan kebutuhan personil atas kebutuhan peralatan kantor yang dapat menunjang kinerjanya	keberhasilan ini ditunjang dengan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kedepannya penyusunan skala prioritas atas kebutuhan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan agar efisiensi penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan efisien
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100%	503,747,000	100%	486,358,778	100 %	96.55 %	3.45	Pelaksanaan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran terlaksana dengan baik sesuai penganggaran	Melakukan pemetaan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan urgensi kecamatan	Keberhasilan ini terjadi dengan pemetaan anggaran sesuai kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan dengan memproyeksikan kebutuhan pada perubahan parsial maupun perubahan anggaran 2021
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon/wifi dan air	Rekening	48	72,251,000	48	60,112,778	100 %	83.20 %	16.80 %	Jumlah pembayaran internet, listrik, dan air yang berbeda sesuai kebutuhan	Anggaran disiapkan sesuai i Mbps wifi internet, listrik, dan air yang digunakan	Anggaran disiapkan sesuai i Mbps wifi internet, listrik, dan air yang digunakan dengan memproyeksikan kebutuhan pada perubahan parsial maupun perubahan anggaran 2021
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan pembayaran jasa pelayanan umum	Orang	108	431,496,000	108	426,246,000	100 %	98.78 %	1.22 %	terjadi perubahan biaya premi asuransi	Penyiapan dana untuk mempersiapkan perubahan biaya premi asuransi dalam perencanaan anggaran	Keberhasilan ini ditunjang dengan pembayaran jasa keuangan kepada tenaga administrasi secara tepat waktu dan kedepannya perlu disiapkan anggaran terhadap perubahan premi asuransi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah	Persen	100%	73,142,858	100%	61,759,711	100 %	84.44 %	15.56 %	Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terealisasi dengan baik	Melakukan pemetaan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan fokus pada	keberhasilan ini ditunjang dengan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kedepannya penyusunan skala prioritas atas kebutuhan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5	43,352,498	5	33,364,771	100 %	76.96 %	23.04 %	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional disesuaikan dengan kebutuhan	Diperlukan anggaran pemeliharaan kendaraan pribadi yang digunakan sebagai operasional kantor	keberhasilan ini ditunjang dengan penyediaan anggaran yang memadai dalam pemeliharaan kendaraan operasional pelayanan dan motor sampah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peningkatan Operasional kelurahan Majang	Unit	1	29,790,360	1	28,394,000	100 %	95.31 %	4.69 %	pemeliharaan rutin gedung kantor terlaksana sesuai biaya anggaran setahun	Pemeliharaan gedung kantor harus lebih maksimal demi kenyamanan dan kelancaran peayanan	keberhasilan kegiatan ini ditunjang dengan memperhatikan kebutuhan pemeliharaan kantor yang disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan



					<div>Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik</div>	<div>Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</div>	<div>Persen</div>	<div>100%</div>	<div>30,999,900</div>	<div>100%</div>	<div>30,977,850</div>	<div>100 %</div>	<div>99.93 %</div>	<div>0.07 %</div>	<div>Pandemi Covid 19 membatasi kegiatan perkantoran dan kegiatan konsultasi serta koordinasi sehingga pelaksanaan pelayanan publik sedikit terhambat.</div>	<div>melakukan kegiatan pelayanan dan koordinasi pelayanan dengan memanfaatkan media elektronik atau daring untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi</div>	<div>keberhasilan ini didukung dengan manajemen kinerja dan keuangan yang telah dibangun, disiplin pegawai serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung penunjang pelaksanaan pelayanan publik dan konsultasi secara daring</div>
					<div>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</div>	<div>Persentase Pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</div>	<div>persen</div>	<div>100%</div>	<div>30,999,900</div>	<div>100%</div>	<div>30,977,850</div>	<div>100 %</div>	<div>99.93 %</div>	<div>0.07 %</div>			
					<div>Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait</div>	<div>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah</div>	<div>Paket</div>	<div>1</div>	<div>30,999,900</div>	<div>1</div>	<div>30,977,850</div>	<div>100 %</div>	<div>99.93 %</div>	<div>0.07 %</div>			
<div>2</div>	<div>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</div>	<div>Persentase Pelayanan kepada masyarakat yang dilkasnakan sesuai standar pelayanan</div>	<div>92%</div>	<div>113%</div>	<div>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan</div>	<div>Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</div>	<div>Persen</div>	<div>100%</div>	<div>2,069,113,950</div>	<div>100%</div>	<div>1,785,994,248</div>	<div>100 %</div>	<div>86.32 %</div>	<div>13.68 %</div>	<div>Realisasi Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan secara umum terlaksana dengan baik dan mengalami sedikit kendala pada pencairan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan covid 19 yang disebabkan oleh tidak adanya petunjuk teknis penggunaan anggaran tersebut</div>	<div>melakukan peningkatan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta melakukan rapat koordinasi dengan Inspektorat, Bappeda dan BKAD terkait penggunaan anggaran tersebut</div>	<div>keberhasilan ini ditunjang dengan pemenuhann kebutuhan Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan pada setiap kelurahan dengan memperhatikan hasil musrenbang kelurahan dan Kecamatan serta prioritas kebutuhan masyarakat</div>
					<div>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</div>	<div>Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi pemberdayaan desa</div>	<div>Persen</div>	<div>100%</div>	<div>109,113,950</div>	<div>100%</div>	<div>92,701,700</div>	<div>100 %</div>	<div>84.96 %</div>	<div>15.04 %</div>	<div>Realisasi koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terlaksana dengan baik</div>	<div>melakukan peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan baik melalui online maupun offline dengan mematuhi protokol kesehatan</div>	<div>keberhasilan ini ditunjang dengan pemenuhann kebutuhan sarana dan prasrana media koordinasi berbasis teknologi dan informasi di kelurahan</div>

Peningkatan Evektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilatah kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK	Dokumen	1	109,113,950	1	92,701,700	100 %	84.96 %	15.04	Pemenuhan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK terpenuhi dengan baik	Penyiapan data dan arsip mengenai pelaksanaan valuasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK perlu ditingkatkan dengan menggunakan teknologi dan informasi	Keberhasilan ini ditunjang dengan pemenuhan dokumen evaluasi FKKS dan TKSK yang terpenuhi dengan baik serta kedepannya perlu dilakukan digitaliasi arsip dokumen teraebut
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Paket	3	1,960,000,000	3	1,693,292,548	100 %	86.39 %	13.61	Realisasi Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terlaksana dengan baik	melakukan peningkatan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	keberhasilan ini ditunjang dengan pemenuhann kebutuhan Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan pada setiap kelurahan dengan memperhatikan hasil musrenbang kelurahan dan Kecamatan serta prioritas kebutuhan masyarakat
Pembangunan saran dan prasarana kelurahan	Jumlah Pembangunan saran dan prasarana Kelurahan	Paket	1	741,204,800	1	740,679,800	100 %	99.93 %	0.07	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan terlaksana dengan baik	Pemerataan pembangunan di setiap kelurahan perlu ditingkatkan	Keberhasilan ini ditunjang dengan pemenuhan pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan yang disesuaikan dengan skala prioritas hasil musrenbang kelurahan yang melibatkan seluruh stakeholder di kelurahan
Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat kelurahan	Paket	1	1,218,795,200	1	952,612,748	100 %	78.16 %	21.84	Realisasi Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terlaksana dengan baik	melakukan peningkatan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	keberhasilan ini ditunjang dengan pemenuhann kebutuhan Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan pada setiap kelurahan dengan memperhatikan hasil musrenbang kelurahan dan Kecamatan serta prioritas kebutuhan masyarakat
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Persen	100%	27,000,000	100%	27,000,000	100 %	100.00 %	Efisien	Pelaksanaan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terlaksana dengan baik	kerjasama, Kebersamaan, kekeluargaan dan kekompakan dengan Tripika perlu dipertahankan dan ditingkatkan	keberhasilan ini disebabkan dengan kerjasama, Kebersamaan, kekeluargaan dan kekompakan dengan Tripika kecamatan Tanete Riattang Barat dengan mengintensifikan sosialisasi dan pengaasan langsung kemasyarakat
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Paket	100%	27,000,000	100%	27,000,000	100 %	100.00 %	Efisien	pembayaran operasional pengawasan tripika lancar	Diharapkan pengawasan yang dilakukan sebaiknya disertai	keberhasilan ini ditunjang dengan kerjasama Tripika, tokoh masyarakat serta Satpol PP pengawasan yang



					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Tripika	Kali	36	187,041,044	36	155,000,000	100 %	82.87 %	17.13 %			dengan pembinaan dan pembekalan pengetahuan	dilakukan dalam pembinaan kemasayrakat terhadap peraturan daerah. Kedepannya pembinaan dan pembekalan pengetahuan kepada msayrakat melalui sosialisai perlu ditingkatkan dengan cara persuasif
--	--	--	--	--	---	----------------------------	------	----	-------------	----	-------------	-------	---------	---------	--	--	---	--



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

## **Piagam Penghargaan**

DIBERIKAN KEPADA :

**KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT**

ATAS PRESTASINYA SEBAGAI PERINGKAT II (KEDUA)  
UNTUK KATEGORI KECAMATAN  
HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
TAHUN 2020  
DENGAN NILAI **69,56** DENGAN PREDIKAT **B**

Watampone, 06 Desember 2021

**BUPATI BONE**



**DR. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si**